



PENGADILAN NEGERI CILACAP KELAS IA
Jln. Let. Jend Suprpto No. 67 Telp. (0282) 533052 - 533361
C I L A C A P

Nomor : 02 /Pjb-Posbakum/pn-Cilacap/12/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengadaan Langsung Penyedia Jasa Konsultansi Pos Bantuan Hukum
Pada Pengadilan Negeri Cilacap Tahun 2023

Cilacap, 21 Desember 2022

Kepada Yth.

Calon Penyedia Jasa Konsultansi Pos Bantuan Hukum

Pada Pengadilan Negeri Cilacap Tahun 2023

_di tempat

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket pekerjaan Jasa Konsultansi sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Nama paket pekerjaan : **Pengadaan Jasa Konsultasi Pos Bantuan Hukum Pada Pengadilan Negeri Cilacap Tahun 2023**
Lingkup pekerjaan : Pemberian Jasa Layanan Hukum
Nilai total HPS : Rp **24.000.000** (dua puluh empat juta rupiah)
Sumber pendanaan : DIPA Pengadilan Negeri Cilacap Tahun Anggaran 2023 nomor **SP DIPA-005.03.2.099124/2023** tanggal 30 November 2022

2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat : Pengadilan Negeri Cilacap
Jalan Letnan Jend Suprpto No. 67 Cilacap
Telepon/Fax : (0282) 533052
Website : www.pn-cilacap.go.id

Saudara diminta untuk memasukkan penawaran administrasi, teknis dan biaya, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan Dokumen Penawaran	Senin s/d Kamis, 26 s/d 29 Desember 2022	09.00 s.d 15.00
b.	Penjelasan (Aanwisjing)	Jumat / 30 Desember 2022	09.00 s.d 12.00
c.	Tes Kompetensi untuk petugas yang akan ditempatkan (1 team leader, 2 staf)	Selasa /3 Januari 2023	09.00 s.d 11.00
d.	Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Biaya	Rabu/ 4 Januari 2023	09.00 s.d 12.00
e.	Pengumuman Pemenang	Jumat, 6 Januari 2023	
f.	Penandatanganan SPK dan MoU	Rabu-Jumat / 7 – 9 Januari 2023	09.00 s.d selesai

Kepada lembaga pemberi layanan bantuan hukum yang berminat dapat mendownload dokumen pengadaan di website www.pn-cilacap.go.id.

Pemasukan Dokumen Penawaran dengan menyertakan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Peserta harus memiliki Surat Pengesahan Pendirian Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM.
2. Masuk dalam SK Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum.
3. Memiliki Akta Pendirian
4. Memiliki Surat Keterangan Domisili setempat sesuai dengan Kabupaten/Kota Pengadilan Negeri Cilacap atau memiliki cabang / perwakilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cilacap
5. Memiliki minimal 1 orang Advokat dibuktikan dengan kartu tanda anggota Perhimpunan/Ikatan Profesi yang ditugaskan sebagai Tim Leader
6. Memiliki 2 orang staf atau anggota yang memiliki gelar Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah dibuktikan dengan Surat Keterangan Penugasan. (Jika menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara yang dibuktikan dengan Kartu Hasil Studi (KHS)
7. Melampirkan Fotocopy KTP Pimpinan dan yang akan ditunjuk sebagai petugas Posbakum
8. Tidak masuk dalam daftar hitam; (surat pernyataan bermaterai 10.000 oleh pimpinan LBH)
9. Melampirkan Nomor Rekening atas nama Lembaga
10. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
11. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa konsultansi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak dibuktikan dengan melampirkan Kontrak dan SPMK;
12. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas /peralatan/perengkapan untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi ini, yaitu: Komputer, Printer dan Alat Tulis Kantor dibuktikan dengan bukti pembelian atau sewa;
13. Menandatangani Pakta Integritas
14. Membuat Surat Penawaran (tidak melebihi dari HPS);
15. Membuat Rencana Anggaran Biaya.
16. Dokumen lain yang di persyaratkan dalam Dokumen Pemilihan (SDP)

Apabila memerlukan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Pejabat Pengadaan sesuai alamat tersebut diatas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

